

**POLITIK KEBOHONGAN, POLITIK KEBENARAN, DAN DEMOKRASI INDONESIA:
PERSPEKTIF ETIKA POLITIK BUDDHISME**

Costantinus Fatlolon

Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik St. Yohanes Penginjil, Ambon

costanf@gmail.com

Abstrak

Politik pada hakikatnya merupakan cara mengatur sebuah pemerintahan demi kebaikan warga negara berdasarkan nilai-nilai etis universal. Namun, hakikat politik ini dihancurkan oleh para pelaku politik yang secara sadar menyebarkan opini dan informasi yang tidak benar demi kepentingan politik pribadi dan kelompok mereka sendiri. Artikel ini merupakan sebuah eksposisi kritis terhadap politik kebohongan (*politics of lying*), politik kebenaran (*politics of truth*), dan demokrasi Indonesia dari perspektif etika politik Buddhisme. Argumentasi utamanya ialah politik kebohongan mengabaikan prasyarat-prasyarat epistemik tentang rasionalitas, kritik, kebebasan, keterbukaan, and partisipasi publik untuk mendiskusikan mengenai isu-isu bersama. Pendalaman demokrasi di Indonesia mengandaikan perwujudan prinsip-prinsip etika “politik kebenaran” seperti rasionalitas, kritik, kebenaran, kesetaraan, keterbukaan, dan partisipasi inklusif warga negara dalam proses pengambilan keputusan tentang masalah-masalah bersama.

Kata Kunci: Buddhisme, Demokrasi, Etika, Kebenaran dan Kebohongan, Politik

Abstract

Politics essentially is a way of organising a government for the good of citizens based on universal ethical values. However, the essence of politics is destroyed by political actors who consciously spread incorrect opinions and information for the sake of their own personal and group political interests. This article is a critical exposition of the politics of lying, the politics of truth, and Indonesian democracy from the perspective of Buddhist political ethics. The main argument is that the politic of lying undermines epistemic conditions in terms of rationality, criticism, freedom, transparency, and public engagement in discussing common issues. This type of politics devalues the principles of political ethics for the development of a democratic Indonesia. The deepening of democracy in Indonesia presupposes the embodiment of ethical principles of “politics of truth” such as rationality, criticisms, truth, equality, openness, and inclusive participation of citizens in decision-making processes on common issues.

Keywords: Buddhism, Democracy, Ethics, Lying and Truth, Politics

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara hukum demokrasi yang menjamin hak dan kebebasan warganya secara setara untuk terlibat dalam bidang politik dan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pemerintahan.” Pernyataan ini lahir dari kesadaran negara bahwa hak politik merupakan unsur konstitutif dan asasi yang inheren dalam diri manusia secara alamiah. Inilah alasan Aristoteles (1995: 1.2.6.1253) menyebut manusia sebagai makhluk politik, yaitu pribadi yang secara alamiah memiliki kecenderungan dan kemampuan untuk bersosialisasi dan terlibat dalam berbagai jenis asosiasi politik.

Peranan utama politik dan komunitas politik adalah menghasilkan kehidupan yang bernilai, yaitu keadilan dan kebahagiaan masyarakat. Manusia yang terlibat dalam politik diberkahi kemampuan berbicara untuk menghasilkan argumen-argumen moral untuk kebaikan masyarakat umum. Dikatakan Aristoteles (1995: I.2.7.1253), “Ucapan... berfungsi untuk memperjelas apa yang bermanfaat dan apa yang merugikan, dan begitu juga apa yang adil dan apa yang tidak adil.” Tujuan utama politik adalah untuk mencapai keadilan dan kebahagiaan hidup bersama (*bonum commune*).

Idealisme politik di atas semakin problematis saat ini dengan hadirnya berbagai bentuk kebohongan, termasuk berita palsu, yang berkembang di media sosial (Aguas, 2023; Prasetyo, 2022; Adiputra, 2021). Dalam ranah politik praktis, beberapa politisi mengucapkan ujaran-ujaran kebohongan untuk meyakinkan publik agar percaya bahwa apa yang mereka disampaikan adalah sebuah kebenaran (Talissee, 2018; Rosenfeld, 2021). Ada pula yang atas nama kebebasan secara sadar melakukan ujaran kebencian di ruang publik dan media massa sehingga memantik konflik horizontal di tengah masyarakat (Howard, 2019). Akibatnya, terjadi degradasi budaya politik yang rasional dan bermartabat dan pengabaian terhadap prasyarat-prasyarat epistemik yang diperlukan untuk mendiskusikan secara imparial ketidaksetujuan mengenai isu-isu sosial-politik (Casto, 2019). Lebih dari itu, terjadi pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip etika politik yang menjadi dasar kehidupan demokratis seperti keadilan, kebenaran, diskursus rasional, dan musyawarah-mufakat.

Berhadapan dengan problem tersebut, para intelektual dan penulis etika politik Buddhisme telah berupaya mencari solusi alternatif untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang lebih demokratis. Menurut Tantra (2021), politik Indonesia harus senantiasa disertai dengan kebijaksanaan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebenaran. Shofwan (2021) menegaskan perlunya prinsip etis bagi para politisi dan aparat negara untuk membangun bangsa dan negara Indonesia dalam keberagaman. Sedangkan Purwanti (2019) menegaskan bahwa dari perspektif Agama Buddha *hoaks* tak dapat ditolerir. Masyarakat perlu mengembangkan cara melihat dan berpikir yang benar agar tidak terjadi lagi kebohongan di tengah masyarakat.

Karya-karya di atas lebih menjelaskan tentang pemahaman politik, etika politik dan aplikasinya terhadap kehidupan bersama dan bernegara tetapi tidak membahas secara khusus politik kebohongan dan politik kebenaran menurut etika politik Buddhisme untuk pembangunan demokrasi Indonesia. Artikel ini bertujuan mengatasi kekurangan tersebut dengan memberikan sumbangan teoretis bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.

Pertanyaan utama penelitian ini ialah paradigma politik apakah yang diperlukan saat ini untuk membangun Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi? Artikel ini mempertahankan argumen bahwa pemerintah Indonesia perlu menghidupi paradigma “politik kebenaran” (*politics of truth*), yaitu komitmen moral para pejabat atau otoritas publik, termasuk para politisi, untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh anggota masyarakat melalui cara merasa, berpikir, melihat, berkata, dan bertindak yang benar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksposisi kritis. Pendekatan eksposisi adalah usaha untuk membahas topik penelitian dengan menyajikan informasi secara jelas melalui

penelitian terhadap literatur seperti buku, jurnal, internet dan lain sebagainya (Khotari, 2004: 2). Dalam konteks ini, penelitian ini akan meneliti pandangan etika politik Buddhisme tentang politik kebohongan, politik kebenaran dan demokrasi serta aplikasinya bagi pembangunan demokrasi Indonesia.

Sedangkan pendekatan kritis adalah usaha untuk menganalisis secara mendalam prinsip-prinsip normatif dan praktik-praktik nyata dengan tujuan untuk menilai bagaimana praktik-praktik tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip normatif. Pendekatan ini juga berusaha mencari solusi alternatif bagi persoalan yang dihadapi (Dryzek, 1995: 109). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kritis digunakan untuk menilai sejauhmana demokrasi Indonesia telah sejalan dengan prinsip-prinsip etika Buddhisme sekaligus menunjukkan jalan keluar berdasarkan perspektif tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Politik Menurut Etika Buddhisme

Buddhisme umumnya dipahami sebagai “sistem metafisik atau agama-filosofis yang menyajikan pandangan total tentang dunia dan tempat manusia di dalamnya, termasuk resep untuk mengatur urusan manusia” (Jayasuriya, 2008: 42). Buddhisme memainkan peran penting dalam pembentukan negara serta dalam cara-cara yang kurang formal dalam menafsirkan dan menginformasikan proses sosial dan politik sejak awal hingga saat ini. Karena itu, politik selalu menjadi bagian dari agama Buddha (Harris, 2007).

Lalu, apa itu politik menurut Buddhisme? Agama Buddha mengajarkan bahwa politik adalah aktivitas manusia untuk memerintah masyarakat dan mengendalikan institusi masyarakat berdasarkan kebenaran. Tujuan utama dari politik adalah untuk memastikan stabilitas sosial, keadilan dan perdamaian. Politik harus mempromosikan hukum dan peraturan, menghukum pelanggaran dan mencegah kemiskinan ekstrim yang dapat menyebabkan kejahatan, konflik dan perang.

Politik senantiasa berurusan dengan cara mengatur pemerintahan. Ada berbagai macam bentuk pemerintahan seperti monarki, otokrasi, atau demokrasi. Dalam perspektif Buddhisme, istilah pemerintahan (*khattavijjà* atau *pālanavijjà*) mengacu pada penerapan teori politik pada administrasi suatu negara (Singh, Ansari, and Singh, 2009: 1109). Dalam Kanon *Pāli* diceriterakan bahwa Sang Buddha lebih memilih sistem pemerintahan republik. *Mahāparinibbāna Sutta* menjelaskan bahwa pilihan ini didasarkan pada Sang Buddha berdasarkan logika etika humanistik. Ia kemudian menasihati warga Vajji dari Vasili yang diancam oleh raja agresif yang mengamuk (*Ajatasatru*) untuk bertindak dengan hati-hati dan terampil menggunakan bentuk-bentuk resolusi konflik berdasarkan prinsip demokrasi dan saling menghormati (Jayasuriya, 2008). Ia kemudian meminta mereka untuk mengadakan pertemuan rutin dan sering untuk membahas urusan negara secara kolektif satu sama lain (Singh, Ansari, and Singh, 2009).

Konsepsi demokrasi yang diajarkan sang Buddha berdasarkan prinsip persamaan semua warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*). Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin masyarakat. Pemimpin yang terpilih dianggap sebagai “Yang Agung (*Maha Sammata*),” yaitu seorang yang saleh, tampan, dan menyenangkan. Ia dipilih oleh seluruh rakyat, diberi wewenang untuk memerintah, dan mampu

menghukum orang yang melakukan kesalahan, dan berhak mendapatkan imbalan berupa sebagian dari beras rakyat (Harvey, 2000: 114). Ia juga haruslah seorang yang memiliki standar moral yang tinggi, termasuk kekuatan fisik atau ketangkasan dan kekuatan otot seperti yang diterapkan dalam pemerintahan dan peperangan.

Dalam menjalankan pemeritahan, pemimpin terpilih harus diberdayakan dengan kekuatan material-kekayaan dan sumber daya material. Ia harus memiliki para pejabatnya yang berkualitas, yang tahu dan siap menjalankan tugas mereka masing-masing. Dia harus menjadi orang dengan kekuatan bangsawan dan memiliki kebijaksanaan atau kecerdasan untuk memimpin rakyatnya. Secara indah Jayasuriya (2008: 56) menjelaskan prototipe pemimpin yang diidamkan rakyat dengan mengutip *Cakkavatti-Sīhanāda Sutta*: “Seorang raja itu murah hati, memiliki indra terkendali, siap untuk berkorban, lugas dalam urusan, lembut dan baik hati, mampu menderita demi rakyat, bebas dari amarah dan kebencian, ia berbelas kasih kepada semuanya, toleran dan sangat mudah didekati.”

Politik merupakan instrumen untuk membangun kualitas manusia yaitu inklusifitas, kesetaraan dan solidaritas. Namun, dalam proses politik selalu ada kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin atau otoritas. Pemimpin yang tidak etis dipandang sebagai tiran, tidak toleran, sewenang-wenang, otokratis, serakah, dan perampas. Salah satu kerusakan akibat kefasikan seorang pemimpin adalah politik kebohongan.

Politik Kebohongan Menurut Etika Buddhisme

Etika pada hakikatnya merupakan ajaran tentang baik dan jahat, apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya dilakukukan seseorang dalam relasi dengan orang lain, entah dalam pikiran, tindakan, sarana, atau motivasi. Singkatnya, etika mengajarkan bagaimana kita seharusnya hidup dalam hubungan dengan orang lain (Dupré, 2013; Bernstein, 1998).

Etika Buddhisme menggunakan dua istilah khas untuk menilai kondisi-kondisi pikiran, tindakan, dan motivasi etis seseorang dalam relasi dengan orang lain, yaitu “yang baik” (*kusala*) dan “yang jahat” (*akusala*). Menurut Nyanaponika Thera (1999: 20), istilah *kusala* merujuk pada pikiran yang sehat (*Arogya*), tanpa cacat moral (*annavajja*), dan mendatangkan hasil tindakan yang menyenangkan (*sukha-vipaka*). Sedangkan *akusala* adalah keadaan pikiran yang tidak sehat (*gelañña*), salah secara moral dan tercela (*sāvajja*), dan membawa akibat yang tidak menyenangkan (*dukkha-vipaka*).

Jadi, yang baik dan yang jahat dalam etika Buddhisme berkaitan erat dengan pikiran, perkataan, tindakan, dan motivasi. Pikiran, perkataan, tindakan, dan motivasi yang baik menghasilkan kebahagiaan. Sebaliknya, pikiran, perkataan, perbuatan dan motivasi yang tidak baik akan menghasilkan kehidupan yang tidak membahagiakan (Payutto 1999: 19). Salah satu bentuk akusala adalah berbohong.

Secara tradisional, istilah berbohong dipahami sebagai sebuah tindakan seseorang yang membuat pernyataan salah yang diyakini sebagai benar dengan maksud untuk menipu orang lain (Rutschmann and Wiegmann, 2017). Menurut Edwin (2015), ada empat syarat agar terjadi suatu kebohongan, yaitu (1) harus ada *seseorang* yang membuat pernyataan, (2) orang tersebut *percaya* bahwa pernyataan itu salah, (3) ada pernyataan *tidak benar* yang disampaikan kepada orang lain, (4) dan *motivasi* atau niat untuk membohongi orang lain. Keempat syarat ini menunjukkan bahwa berbohong bukan hanya masalah komunikasi melainkan tindakan yang

disertai *niat* yang tidak baik untuk mengkomunikasikan apa yang diyakini sebagai salah kepada orang lain. Berbohong adalah sebuah perbuatan salah dan tidak baik secara etis.

Bagaimana kita menghubungkan pengertian di atas dengan politik kebohongan? Dalam ranah politik, istilah tersebut mengacu pada pernyataan pemahaman salah yang diyakini benar oleh pemimpin atau penguasa dengan maksud menggiring publik untuk untuk mempercayainya. Bentuk-bentuk politik kebohongan dapat berupa *pengingkaran (denial)* terhadap fakta-fakta atau kebijakan-kebijakan yang ada, usaha-usaha untuk *menutup-nutupi (cover up)* tindakan-tindakan politik yang mengganggu informasi yang benar tentang ekonomi atau lingkungan, pembentukan persetujuan (*manufacturing consent*) dengan maksud untuk menipu atau mengaburkan persepsi publik, dan tindakan tebak-tebakan (*charades*) untuk mencapai tujuan kebohongan (Cliffe, Ramsay, and Bartlett, 2000: xii).

Ada dua motivasi bagi seorang pemimpin politik untuk berbohong. Pertama, untuk melayani kepentingan nasional. Bagi mereka, kepentingan nasional adalah tujuan atau nilai penting suatu bangsa yang melampaui kepentingan individu atau kelompok tertentu (Ramsay, 2000: 30). Kedua, untuk melindungi kepentingan pribadi pemimpin itu sendiri atau kepentingan teman-temannya. Jenis kebohongan ini sangat berbahaya karena para pemimpin politik dengan sengaja berbohong kepada warganya sendiri (Mearsheimer, 2011: 39-43).

Seluruh penjelasan di atas menunjukkan bahwa esensi politik kebohongan bukan hanya terletak pada benar atau salahnya materi pernyataan seorang pemimpin politik melainkan terlebih pada *niat yang sadar* atau motivasi untuk menyesatkan orang lain dengan informasi yang salah. Motivasi lain dari politik kebohongan adalah usaha menyebarkan informasi atau berita yang tidak benar untuk mendapatkan keuntungan demi membahagiakan diri sendiri (Cliffe, Ramsay, and Bartlett, 2000: 3). Kedua motivasi ini sangat mengkhianati prinsip-prinsip etika Buddhisme.

Teks-teks Buddhisme dengan tegas melarang semua orang, termasuk pemimpin politik, untuk melakukan tindakan yang salah dengan mengambil sesuatu atau menafsirkan suatu teks secara sengaja demi tujuan membohongi orang lain. Semua kebohongan, entah ringan (*lahuka*) atau berat (*garuka*), tidak dapat dibenarkan secara etis dilakukan seseorang karena berbohong tidak beda dengan menyerang eksistensi orang lain (Nance, 2011: 79-80). Jadi, tidak ada pengecualian bagi siapapun untuk berbohong. Praktek-praktek berbohong dapat berupa penipuan, perkataan melebih-lebihkan, penipuan non-verbal dengan isyarat atau indikasi lain, pernyataan yang menyesatkan, menyebarkan berita yang tidak diketahui secara pasti, mengkritik secara berlebihan, dan mengutuk hal-hal yang kita sendiri tidak yakini. Semua praktik ini dianggap sebagai perilaku yang tidak etis untuk dilakukan dalam masyarakat (Harvey, 2000: 74).

Apa akar penyebab seseorang berbohong, termasuk melakukan politik kebohongan, menurut etika Buddhisme? Buddhisme melihat jauh ke dalam lubuk hati manusia dengan mengedepankan *motivasi moral* seseorang. Akar kebohongan didorong oleh keserakahan (*lobha*), kebencian (*dosa*) dan delusi (*moha*).

Keserakahan adalah keadaan nafsu, mencari ketenaran dan tatanan dogmatis yang melekat dalam setiap gagasan. Tujuan utama keserakahan adalah mendapatkan kenikmatan (Thera, 1999: 21). Orang serakah akan mudah berbohong karena ingin mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang-orang yang terdekatnya. Orang serakah juga

melakukan kebohongan dengan maksud memperoleh kekayaan materi, posisi, rasa hormat, kekaguman, pemanjaan diri, nafsu lahiriah, sifat posesif, kenikmatan indrawi, ketenaran, dan sebagainya.

Kebencian adalah suasana pikiran yang ditandai dengan gangguan, kemarahan, dan kebencian membara. Dalam Buddhisme, kebencian digambarkan sebagai ular yang diprovokasi untuk menyebarkan setetes racun, membakar hutan, dan menganiaya musuh ketika mendapat kesempatan (Thera, 1999: 22). Orang yang dimotivasi oleh kebencian akan mudah melakukan kejahatan berbohong dengan maksud untuk menyakiti dan menghancurkan orang lain.

Sedangkan khayalan atau fantasi mengacu pada misorientasi spiritual atau keadaan pikiran yang panik, salah, dan ragu-ragu tentang masalah moral dan spiritual. Orang yang berkhayal pada dasarnya mendistorsi kebenaran atau berpaling darinya dan menganggap dirinya sebagai pusat kebenaran (Thera, 1999: 23). Orang yang berkhayal mudah melakukan kebohongan termasuk mudah berprasangka terhadap orang lain, fanatik, sombong, bersikap irasional, kompulsif, membesar-besarkan hal-hak yang menarik, dan membuat kebohongan demi sebuah lelucon.

Singkatnya, faktor determinan di balik politik kebohongan adalah niat untuk menipu. Bhikkhu Bodhi dengan bijak mengatakan: “Jika seseorang mengatakan sesuatu yang salah dan percaya itu benar, tidak ada pelanggaran *sila* karena niat untuk menipu tidak ada. Meskipun niat menipu umum terjadi pada semua kasus ucapan salah, kebohongan dapat muncul dalam berbagai samaran bergantung pada akar motivasi, apakah keserakahan, kebencian, atau delusi” (Bodhi, 1998: 44).

POLITIK KEBENARAN DAN DEMOKRASI INDONESIA

Salah satu hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia adalah hak atas informasi. Hal ini diungkapkan dalam Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pernyataan konstitusi ini jelas namun tidak senantiasa ditaati oleh sebagian para pemimpin dan warga negara. Hal ini ditandai dengan munculnya berita bohong yang berseliweran di media massa daring dan luring. Demi mencapai kepentingan dan abisi pribadi atau kelompoknya, segelintir orang telah mengkhianati eksistensinya sebagai makhluk komunikatif dengan melakukan pembohongan politik. Tindakan ini melahirkan ketidakharmonisan, perselisihan, polarisasi politik, dan konflik sosial masyarakat (Tapsell 2019; Utami, 2018). Menyiasati fenomena tersebut, Buddhisme menawarkan solusi dan paradigma alternatif.

Politik adalah Sarana Bukan Tujuan

Menurut etika politik Buddhisme, politik adalah sarana atau instrumen untuk mencapai tujuan kepentingan dan kesejahteraan umum. Praksis politik Indonesia tidak boleh dijadikan sebagai tujuan oleh para pemimpin politik untuk mencapai ambisi pribadi dan kelompoknya untuk menguntungkan diri sendiri. Politik harus menyejaterahkan semua anak bangsa tanpa

kecuali. Dalam konteks ini diperlukan para legislator yang tanggap terhadap kebutuhan konstituen mereka dengan sesering mungkin melaksanakan visitasi ke daerah-daerah untuk melihat langsung keadaan dan menyerap aspirasi mereka sehingga perumusan kebijakan-kebijakan politik bisa mengakomodir kepentingan masyarakat, terlebih yang berada di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal di beranda Ibu Pertiwi.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik

Untuk membangun pemerintahan Republik Vijaya, Sang Buddha memberikan beberapa syarat yang harus dilaksanakan secara terus menerus oleh masyarakat, antara lain: (1) mengadakan pertemuan bersama secara teratur, (2) bertemu secara rukun, berpisah secara rukun, dan menjalankan bisnis secara rukun, (3) tidak mengizinkan apa yang telah tidak diizinkan, tetapi berjalan sesuai dengan apa yang telah diizinkan oleh tradisi kuno mereka, (4) menghormati, menghargai, dan menyalami para sesepuh di antara mereka, dan menganggap mereka layak untuk didengarkan, (5) tidak menculik istri dan anak perempuan orang lain secara paksa dan memaksa mereka untuk tinggal bersama mereka, (6) menghormati, menghargai, memuja dan memberi hormat pada kuil Vajjian baik di dalam maupun di luar negeri, tidak menarik dukungan yang dengan tepat telah dibuat dan diberikan sebelumnya, (7) membuat ketentuan yang tepat untuk keselamatan para Arahata, sehingga Arahata seperti itu mungkin datang di masa depan untuk tinggal di sana, dan mereka yang sudah ada di sana dapat berdiam dengan nyaman (Harvey, 2000: 113).

Pembangunan demokrasi Indonesia menuntut adanya pola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan sedemikian adalah partisipasi aktif dari semua pihak baik dari sektor formal dan informal dalam proses pengambilan keputusan. Kehidupan masyarakat demokratis mengadatkan partisipasi aktif pria dan wanita, kaum tua dan muda, para pemimpin politik dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk “mengidentifikasi nilai-nilai bersama, kebutuhan dan tantangan, menetapkan prioritas dan mengembangkan program-program dan bersama-sama mengelola pelaksanaan program-program untuk keuntungan maksimal semua orang” (Bhat, 2004: 221).

Penjelasan di atas sebenarnya sudah ada dalam sistem demokrasi Pancasila namun harus terus digiatkan agar masyarakat tidak tetap berada dalam garis marjinal pengambilan keputusan. Yang diperlukan adalah penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan gender, dan penghormatan penuh terhadap supremasi hukum. Hukum tidak boleh diinstrumentalisasi untuk mencari kepentingan pribadi melainkan untuk membebaskan dan memberikan rasa keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia (Asshidiqie, 2012: 21).

Politik Berlandaskan Prinsip-Prinsip Etika Kebenaran

Menurut etika politik Buddhisme, politik dan praktek pemerintahan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika kebenaran sehingga hak-hak dasar, keadilan, dan kemakmuran dapat tercapai dalam masyarakat. Tetapi apakah itu kebenaran? Menurut Thanissaro Bhikku (2016), istilah “kebenaran” (*sacca*) mengacu pada dua arti yang berbeda, yaitu kejadian atau pengalaman yang benar dan pernyataan yang benar. Kebenaran sebagai kejadian atau pengalaman yang benar berarti sesuatu benar-benar terjadi atau pengalaman aktual. Sedangkan kebenaran sebagai pernyataan yang benar merujuk pada ajaran Sang Buddha sendiri tentang bagaimana manusia memperoleh kebahagiaan dalam dunia dan akhirat.

Untuk membangun negara dan pemerintahan demokratis berdasarkan politik kebenaran, Sang Buddha mengajarkan prinsip-prinsip etis yang dikenal sebagai “Delapan Jalan Mulia” atau “Jalan Tengah” (*majjhimā paṭipadā*) menuju pembebasan. Berikut ini uraian tentang prinsip-prinsip etis tersebut dan aplikasinya bagi pembangunan demokrasi dan politik di Indonesia.

Pandangan yang Benar

Menurut Buddhisme, istilah pandangan pertama-tama berarti pemikiran, pengetahuan, atau kebijaksanaan yang menembus ke dalam hakikat realitas untuk memperoleh wawasan yang mendalam. Pandangan yang benar mengandaikan bahwa manusia memiliki pemikiran, pengetahuan atau kebijaksanaan dalam memandang dunia sebagai sebuah aliran perubahan terus menerus, tidak memuaskan, atau sebagai proses terkondisi. Lebih dari sekedar pandangan atau pemikiran, istilah pandangan juga berarti “niat atau motivasi yang benar” (*samma kamma*). Istilah terakhir ini “merujuk secara spesifik pada aspek tujuan atau buah pertama dari aktivitas mental” (Bodhi, 1998: 26). Menurut Buddhisme, “ketika niatnya benar, tindakannya akan benar, dan untuk niat menjadi benar jaminan yang paling pasti adalah pandangan benar” (Bodhi, 1998: 28).

Niat benar memiliki tiga elemen dasar. Pertama, niat untuk melepaskan. Unsur ini dianggap Buddhisme sebagai kunci menuju kebahagiaan. Sarana yang ditawarkan Buddhisme untuk membebaskan pikiran dari keinginan adalah pemahaman. Hal ini tidak berarti bahwa manusia harus memaksakan untuk menyerahkan hal-hal yang masih berharga di dalam hatinya melainkan mengubah perspektif kita terhadapnya sehingga tidak lagi mengikat manusia (Bodhi, 1998: 31-32). Demokrasi Indonesia berdasarkan politik kebenaran membutuhkan kerelaan untuk mengubah paradigma berpikir, mempertimbangkan secara bijaksana, dan melihat ke dalam aspek tersembunyi dari tindakan berpolitik, mengeksplorasi hasilnya, dan mengevaluasi kelayakan tujuan berpolitik. Melalui pertimbangan yang bijak, demokrasi dan politik Indonesia bukan didasarkan pada apa yang menyenangkan atau strategis tetapi lebih pada apa yang benar.

Kedua, niat baik (*metta*) atau “kasih sayang”. Dalam Buddhisme, istilah *metta* berarti kebajikan, keramahan, persahabatan, niat baik dan minat aktif pada orang lain, atau lebih tepat teman sejati yang membutuhkan (Thera, 1994). Demokrasi Indonesia dan politik yang dimotivasi oleh *metta* berkomitmen untuk mendobrak batasan dan penghalang antar manusia dan mengembangkannya untuk semua makhluk (*sabbe satta bhavantu sukhitatta*) agar semua orang saling melindungi dan mengasihi satu sama lain sebagai satu kesatuan anak bangsa.

Ketiga, niat untuk tidak menyakiti (*karuna*) atau sikap “welas asih”. Dalam Buddhisme, istilah ini mengacu pada keutamaan keinginan untuk menghilangkan penderitaan orang lain. Demokrasi Indonesia yang dimotivasi oleh *karuna* didasarkan pada penghargaan dan cinta terhadap sesama melampaui melampaui ruang dan waktu yang terbatas hingga mencakup semua makhluk hidup tanpa kecuali, bagaikan seorang ibu yang penuh kasih merasakan belas kasihan kepada semua anaknya terlepas dari apakah mereka berperilaku baik atau buruk. Politik *karuna* di Indonesia mengandaikan para pemimpin dan otoritas publik siap melayani rakyatnya dengan motivasi altruistik.

Keputusan yang benar

Buddhisme menjelaskan bahwa keputusan yang benar berkaitan dengan emosi yang mengantarkan manusia menuju kebebasan damai. Demokrasi Indonesia berdasarkan kebenaran menuntut bahwa para pemimpin masyarakat Indonesia perlu menjauhkan diri dari niat jahat dan kekejaman untuk menipu sesama. Mereka harus menunjukkan cinta dan belas kasih kepada semua melalui keputusan-keputusan yang tepat. Keputusan-keputusan yang benar melampaui semua sensualitas dan mengarahkan niat kita menuju *Nibbāna*.

Ucapan yang benar

Ucapan penting bagi etika Buddhisme karena berfungsi sebagai sarana untuk mengirimkan pesan dan mencerminkan karakter dan moralitas seseorang (Indasara, 2018b). Kualitas kepengurusan dan institusi politik terlihat dari ucapan atau percakapan yang benar karena dimensi ini tidak sekedar masalah teknis tetapi terkait erat dengan perilaku moral para penguasa (Agree, 2002). Buddhisme membagi ucapan benar menjadi empat komponen (Bodhi, 1998: 43).

Pertama, menjauhkan diri dari ucapan salah (*musavada veramani*). Pemimpin politik yang layak dipercaya adalah dia yang mengatakan kebenaran dan mengabdikan pada kebenaran (Bodhi, 1998: 44). Demokrasi Indonesia akan menghasilkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat apabila para pemimpin dan rakyat Indonesia layak dan dapat dipercaya karena mereka tidak pernah dengan sengaja mengatakan kebohongan, baik untuk keuntungan dirisendiri, atau untuk keuntungan orang lain, atau untuk keuntungan apapun.

Kedua, tidak mengucapkan kata-kata fitnah (*pisunaya vacaya veramani*) yang dimaksudkan untuk menciptakan permusuhan dan perpecahan, untuk mengasingkan satu orang atau kelompok dari orang lain. Motif di balik ucapan fitnah adalah kebencian terhadap kesuksesan atau persaingan, niat untuk menjatuhkan orang lain dengan penghinaan verbal (Bodhi, 1998: 46-47). Ucapan-ucapan para politisi, pemimpin, dan warga negara Indonesia harus mempromosikan persahabatan dan harmoni satu sama lain. Ucapan-ucapan itu keluar dari pikiran yang penuh cinta kasih dan simpati sehingga dapat memenangkan kepercayaan dan kasih sayang orang lain sehingga mereka, sebagaimana dikatakan Bodhi (1998), merasa bisa mencurahkan isi hati mereka tanpa takut dan apa yang diungkapkan akan digunakan untuk melawan mereka.

Ketiga, tidak mengucapkan kata-kata kasar (*pharusaya vacaya veramani*) yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain melalui kata-kata pelecehan, penghinaan, atau menyindir (Bodhi (1998: 48). Para pemimpin negara dan warga negara Indonesia perlu belajar mentolerir kesalahan dan kritik dari orang lain, bersimpati dengan kekurangan mereka, menghargai perbedaan sudut pandang, menanggung pelecehan tanpa merasa harus membalas, dan menembus dengan pikiran yang penuh kasih, luas, dalam, tanpa batas, terbebas dari amarah dan kebencian.

Dan, keempat, menjauhkan diri dari obrolan kosong (*samphappalapa veramani*). Obrolan kosong tidak mengkomunikasikan apa pun yang berharga, tetapi hanya menimbulkan kekotoran batin dalam pikiran seseorang dan orang lain (Bodhi, 1998: 48-49). Para pemimpin politik dan warga negara Indonesia perlu membatasi pembicaraan yang tidak berguna dan lebih membicarakan hal-hal yang benar-benar penting bagi kesejahteraan orang lain

Bertindak yang Benar

Menurut Buddhisme, tindakan yang benar berarti menjauhkan diri dari perilaku jasmani atau duniawi yang salah. Politik yang benar berisikan pesan etis agar para pemimpin tidak melakukan perilaku tidak bermoral salah seperti serangan yang gencar terhadap makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, dan perbuatan salah sehubungan dengan kenikmatan indriawi. Demokrasi Indonesia membutuhkan para pemimpin dan warga negara ekseplaris yang mampu memberikan teladan kesalehan dan menjadi perakat anak bangsa melalui ucapan dan tindakannya yang benar.

Mata Pencapaian yang Benar

Buddha menguraikan jalan ini sebagai cara untuk menghindari cara-cara mencari nafkah yang menyebabkan penderitaan bagi orang lain berdasarkan tipu daya dan keserakahan, atau perdagangan senjata, makhluk hidup, daging, minuman beralkohol atau racun. Para pemimpin politik Indonesia adalah orang-orang terpilih yang dipercayakan masyarakat untuk menjaga keadilan dan mengatur kesejahteraan masyarakat. Profesi mereka sebagai pelayan masyarakat menuntut mereka untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela untuk memperoleh kepentingan sendiri dan kelompoknya. Mereka harus tampil sebagai pribadi-pribadi yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Usaha yang Benar

Usaha yang benar dipahami oleh Buddhisme sebagai upaya-upaya untuk mengembangkan pikiran dengan cara yang bermanfaat. Dalam mengusahakan kesejahteraan rakyat, para pemimpin politik dapat mengusahakan empat upaya moral. Pertama, menghindari munculnya kondisi pikiran tidak bermanfaat yang mengungkapkan kemelekatan, kebencian, dan delusi. Upaya kedua adalah berusaha untuk mengatasi atau merusak kondisi pikiran tidak bermanfaat yang muncul. Upaya ketiga diarahkan pada pengembangan meditatif dari kondisi pikiran bermanfaat. Dan upaya keempat adalah memelihara dan menstabilkan kualitas pikiran yang bermanfaat.

Perhatian yang Benar

Menurut Buddhisme, jalan ini mengacu pada keadaan kesadaran yang tajam akan fenomena mental dan fisik saat muncul di dalam dan di sekitar seseorang, dan dengan cermat mengingat hubungan antara berbagai hal. Para pemegang otoritas dan pemimpin politik Indonesia hendaknya tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya melainkan harus memperhatikan kepentingan seluruh rakyat. Mereka perlu memberikan perhatian secara seimbang untuk seluruh dimensi kehidupan masyarakat sehingga terjadi keseimbangan perhatian dalam segi-segi kehidupan bermasyarakat. Lebih dari itu, mereka perlu memiliki kepekaan terhadap fenomena yang muncul dalam kehidupan individu dan masyarakat dan memberikan perhatian yang tepat untuk mengatasi bila terjadi masalah.

Penyatuan Mental yang Benar

Dalam Buddhisme, jalan ini mengacu pada berbagai tingkat ketenangan batiniah (*jha ñas*) yang muncul dari perhatian yang secara dekat fokus pada objek meditasi. Di tengah kesibukan mereka mengurus kehidupan publik, para pemimpin masyarakat diharapkan memiliki waktu untuk merefleksikan ucapan, pikiran, tindakan, dan motivasi mereka. Indonesia adalah masyarakat agamis. Ucapan dan tindak tanduk pemimpin dan warga

masyarakat senantiasa berdasarkan pada keyakinan agama masing-masing. Landasan spiritual ini harus menjadi bagian hidup dari tutur dan tindakan para pemimpin sehingga keputusan-keputusan, ucapan dan tindakan mereka sungguh-sungguh membawa berkat bagi kemaslahatan bersama.

KESIMPULAN

Pembangunan demokrasi Indonesia perlu berlandaskan pada paradigma politik kebenaran. Politik merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama. Perwujudan politik kebenaran ini mengandaikan komitmen moral para penguasa dan penguasa terhadap nilai-nilai etis kebenaran yaitu menggunakan kata-kata secara bijak, menginformasikan, membantu atau mengungkapkan kebaikan kepada orang lain, bukan hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Politik kebenaran menuntut pada pemimpin menjauhkan diri dari ucapan salah, tidak mengucapkan fitnah, tidak mengucapkan kata-kata kasar, dan tidak terlibat dalam obrolan kosong.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, W.M. (2021). "Antara Kuasa Kebohongan dan Kebebasan Beropini: Analisis Wacana Foucauldian pada Hoaks Pandemi Corona di Indonesia." *Interaksi: Jurnal Komunikasi* 10(1): 12-21. <https://doi.org/10.14710/interaksi.10.1.12-21>.
- Agree, Sam. (2000). *Promoting Good Governance: Principles, Practices, and Perspectives*. London: Commonwealth Secretariat.
- Aguas, Jove Jim S. (2023). "The Critical Role of Philosophy in the Future of the Philippines." *Philosophia: International Journal of Philosophy*, 24(1): 168-181.
- Aristotle. 1995. *Politics: Books I and II*, translated with a Commentary by Trevor J. Saunders. Oxford: Clarendon Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2012). "Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia." Dalam Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, 19-44. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Bernstein, Mark H. (1998). *On Moral Considerability: An Essay on Who Morally Matters*. Oxford: Oxford University Press.
- Bhat, Mohd. Yousuf. (2004). "Good Governance: A Promise for Justice." *The Indian Journal of Political Science* 65(2): 221-234.
- Bhikku, Thanissaro. (2016). "Truths with Consequences." <https://www.buddhistinquiry.org/article/truths-with-consequences/>, diakses 25 Maret 2023.
- Bodhi, Bhikkhu. 1999. *The Noble Eightfold Path: The Way to the End of Suffering*. Kandy: Buddhist
- Castro, Juan Samuel Santos. (2019). "Políticos Mentirosos Y Tramposos Democráticos: ¿Es La Mentira Política Diferente De Otras Clases De Mentiras?" *Universitas Philosophica* 36(72): 17-25.

- Dhammika, Bhante Shravasti. (1989). "Guide to Buddhism A to Z." <http://www.buddhisma2z.com/content.php?id=157>; diakses 3 Maret 2023.
- Dryzek, John S. (1995). "Critical Theory as a Research Program," dalam *The Cambridge Companion to Habermas*, ed. Stephen K. White, 97-119. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dongen, Els van, and Sylvie Fainzang. (2022). "Lying, Misery and Illness: Towards a Medical Anthropology of the Lying." *Anthropology & Medicine*, 9(2): 85-95.
- Dupré, Ben. (2013). *50 Ethics Ideal You Really Need to Know*. London: Carmelite House.
- Frankena, William K. 1973. *Ethics*, 2nd edition. Englewood Cliff, New Jersey: Printice-Hall, Inc.
- Harris, Ian. (Ed). (2007). *Buddhism, Power and Political Order*. London and New York: Routledge.
- Harvey, Peter. (2000). *An Introduction to Buddhist Ethics: Foundations, Values, and Issues*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Howard, Jeffrey W. (2019). "Free Speech and Hate Speech." *Annual Review of Political Science* 22: 93-109, <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051517-012343>.
- Jayasuriya, Laksiri. (2008). "Buddhism, Politics, and Statecraft." *International Journal of Buddhist Thought & Culture* 11: 41-74.
- Jayaram, V. (1999). "The Buddha's Teaching on Right Mindfulness." <https://www.hinduwebsite.com/buddhism/mindfulness.asp>; Internet, diakses 25 Maret 2023.
- Khotari, C.R. (2004). *Research Methodology: Methods and Techniques*, Second Revised Edition. New Delhi, India: New Age International.
- Long, William J. (2021). *A Buddhist Approach to International Relations: Radical Interdependence*. Gewerbestrasse, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Mahon, James Edwin, (2015). "The Definition of Lying and Deception." [https://plato.stanford.edu/entries/lying-definition/#:~:text=a%20bank's%20ATM\).-,1.4%20Intention%20to%20Deceive%20the%20Addressee%20Condition,untruthful%20statement%20to%20be%20true](https://plato.stanford.edu/entries/lying-definition/#:~:text=a%20bank's%20ATM).-,1.4%20Intention%20to%20Deceive%20the%20Addressee%20Condition,untruthful%20statement%20to%20be%20true;); diakses 27 Maret 2023.
- Mearsheimer, John J. (2011). *Why Leaders Lie: The Truth about Lying in International Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Moore, Matthew J. (2015). "Buddhism and Political Theory." *Philosophy East & West* 65(1): 36-64.
- Nance, Richard F. 2011. "Tall Tales, *Tathāgatas*, and Truth on the 'Privileged Lie' in Indian Buddhist Literature." *Journal of the International Association of Buddhist Studies* 33(1-2): 75-101.
- Payutto, P.A. (1993). *Good, Evil and Beyond: Karma in the Buddha's Teaching*. Kandy, Sri Lanka: Buddhist Publication Society.
- Prasetyo, Arienda Addis. (2022). "Disrupsi Perpustakaan Sebagai Ruang Publik: Membedah Pemikiran Jurgen Habermas dan Ruang Publik Digital." *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(3): 213-218.

- Purwanti, Afrida. (2019). *Bahaya Berita Bohong: Pandangan Umat Buddha di Vihara Avalokitesvara Pondok Cabe terhadap Berita Bohong (HOAK)*. Skripsi Sarjana Strata Satu, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48105/1/SKRIPSI%20AFRIDA%20PURWANTI.pdf>., diakses 24 Agustus 2023.
- Rosenfeld, Sophia. (2021). "Is Lying Actually a Good Thing in Politics?" <https://knightcolumbia.org/blog/lies-and-the-law-is-lying-actually-a-good-thing-in-politics>; diakses 27 Maret 2023.
- Rutschmann, Ronja & Wiegmann, Alex. (2017). "No Need for An Intention to Deceive? Challenging the Traditional Definition of Lying." *Philosophical Psychology*, 30(4): 438-457.
- Singh, Deepali, Ansari, Nafees A. & Singh, Shaifali. (2009). "Good Governance & Implementation in the Era of Globalization." *The Indian Journal of Political Science* 70(4): 1109- 1120.
- Shofwan, Arif Muzayin. (2021). "Etika Ajaran Agama Buddha untuk Membangun Bangsa dan Negara dalam Kebersamaan." *ABIP: Jurnal Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan* 7(2): 172-178. <https://doi.org/10.53565/abip.v7i2.316>.
- Tantra, Manggala Wiriya. (2021). "POLITIK DALAM PANDANGAN AGAMA BUDDHA." *ABIP: Jurnal Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan* 4(1): 88-102.
- Talisse, Robert B. (2018). "There's No Such Thing as Fake News (And That's Bad News)." <https://www.3ammagazine.com/3am/theres-no-such-thing-as-fake-news-and-thats-bad-news/>diakses 27 Maret 2023.
- Tapsell, Ross. (2019). "Indonesia's Policing of Hoax News Increasingly Politicised." *Perspective* 75: 1-10. https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2019_75.pdf. Diakses 23 Agustus 2023.
- The Buddhist Publication Society. (2018) "The Practice of Loving-Kindness (*Metta*) as Taught by the Buddha in the *Pali Canon*." Compiled and translated by Ñanamoli Thera. <https://www.accesstoinight.org/lib/authors/nanamoli/wheel007.html>; accessed 19 Agustus 2023.
- Thera, K. Sri Dhammananda Maha. (2006). "Buddhism and Politics." <https://www.budsas.org/ebud/whatbudbeliev/229.htm>, diakses 10 februari 2023.
- Thera, Nyanaponika. (1999). *The Roots of Good and Evil*. Penang, Malaysia: Inward Path Press.
- Utami, Pratiwi. (2018). "Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesian Politics and Democracy." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 22(2): 85-97. <https://doi.org/10.22146/jsp.34614>.